

Judul : Gerindra: Ini Intervensi!
Tanggal : Kamis, 14 September 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Gerindra: Ini Intervensi!

MENINDAKLANJUTI kehebohan atas surat yang ditandatangani Fadli Zon, DPR pun buru-buru klarifikasi dengan menyatakan bahwa surat tertanggal 12 September 2017 tersebut bersifat pribadi. Bahkan para petinggi Gerindra pun 'kebakaran jenggot' dengan aksi Fadli Zon tersebut.

"Saya belum melihat (surat DPR ke KPK, red). Untuk itu kita ketemu dulu seluruhnya. Kalau itu kabarnya seperti itu dan disampaikan media," kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto kepada wartawan di Komplek parlemen, Senayan, Rabu (13/9).

Senada, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan mengatakan, di lingkup pimpinan DPR RI, dirinya baru membaca surat tersebut saat rapat pimpinan (rapim) ■

► **Baca Gerindra...Hal 7**



Gerindra: Ini Intervensi!

Sambungan dari hal 1

Itupun ia yang minta dicari-kan surat yang sudah menjadi pembicaraan di lingkungan Senayan.

"Usai membaca, saya mena-nyakan, ini atas nama pin-pinan DPR atau apa? Kalau atas nama pimpinan DPR saya ke-beratan, karena tidak pernah dalam konteks rapim," kata Taufik Kurniawan.

Tapi, tambah Taufik, jika sifatnya meneruskan aspirasi warga, itu masih bisa dimaklumi. "Kalau menyangkut tafsir lain, tujuan lain, tanyakan langsung pada Pak Fadli saja," bebernya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/9).

Taufik menguraikan, keputu-san pimpinan tentu sesuai as-pirasi masyarakat, atau dengan kata lain meneruskan aspirasi. Istilahnya, tak perlu dibahas dalam rapim tak masalah. Tapi, yang terkait dengan kebijakan lembaga, itu yang harus mela-lui rapim.

"Saya sudah konfirmasi Pak Fadli, sampai rapur (rapat pari-purna, red) ini, pimpinan saya dan Pak Agus belum tahu soal surat itu. Setelah kita cek su-ratnya hanya meneruskan. Itu pada korpolkam (bidang yang ditangani Fadli Zon, red)," te-rangnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Robert J Kardi-nal saat dikonfirmasi apakah surat tersebut permintaan dari fraksinya, Robert mengaku ti-dak tahu. "Menahu soal surat tersebut," katanya.

"Itu urusan Setjen DPR, sila-kan saja. Saya nggak mau cam-pur-campur. Masak hukum kita intervensi campur-cam-pur. Fraksi nggak tahu," te-gasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Ko-misi III DPR dari Fraksi Gerin-dra, Desmond J Mahesa juga ikut bicara. Menurut dia, surat tersebut salah kaprah. "Yang jadi soal, itu surat tujuannya ke KPK atau pengadilan? Kalau tujuannya ke KPK, ya salah ka-prah," ujarnya kepada war-tawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/9).

Ia menjelaskan, surat tersebut dianggap salah kaprah karena ditujukan ke KPK. Sementara proses peradilan dan sidang praperadilan sudah jalan. Sehingga surat tersebut sudah tak layak diterbitkan.

"Yang bisa hentikan itu ranah pengadilan, diteruskan atau tidak. Tentunya dengan per-timbangan-pertimbangan yang sangat rasional. Kalau meng-hentikan, itu mengintervensi pengadilan, DPR tak benar. Pak Fadli Zon tak benar. Ya itu baru intervensi, jadi jangan dilihat surat itu penting, surat itu tak penting," kata Desmond.

Menurutnya, pimpinan DPR tak paham teknis peradilan, sehingga tak perlu dilayani KPK. "Bukan urusan pimpinan KPK. Ini surat yang salah ka-prah, pimpinan DPR yang tak paham sistem peradilan dan penegakan hukum. Kalau se-belum praperadilan DPR kirim surat ke KPK, mungkin ada se-suatu yang bisa kita nilai. Tapi

posisi sudah di pengadilan, dia kirim ke KPK, ada nilainya ng-gak?" kata Desmond.

Saat ditanya soal kewenangan pimpinan DPR mengirimkan surat tersebut, ia enggan men-jawabnya karena bukan wila-yahnya. Tapi, ia juga tak men-getahui apakah surat tersebut bersifat pribadi atau melalui rapat pimpinan.

"Yang harus dipertanyakan itu. Apa surat ini resmi DPR atau pribadi. Kalau fraksi beda wilayahnya, ini wilayah Fadli sebagai wakil ketua DPR. Bu-kan Fraksi Gerindra. Kalau Fraksi Gerindra harus sepe-ne-tahuan saya. Kebijakan pin-pinan fraksi dan hukum. Saya satu fraksi sama dia, satu par-tai, tapi saya nggak lakukan pembelaan apa-apa," imbuh-nya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muza-ni juga menilai tindakan Fadli Zon mengirim surat permoho-nan penundaan pemeriksaan Setya Novanto ke KPK melam-pau batasan. "Tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi ter-hadap proses hukum di KPK yang kini sedang berlangsung."

"Nah proses hukum ini di-tangani oleh lembaga indepen-den namanya KPK. Hormati keputusan hukum, KPK untuk melakukan proses ini. Jadi pin-pinan DPR harus menghormati proses ini," kata Muzani kepada wartawan di Komplek Pa-lemen, Senayan, Rabu (13/9).

Ia sangat menyangkan tin-dakan anggota fraksinya itu. "Kalau pimpinan DPR yang menandatangani surat tersebut, Muzani menambah-kan, pimpinan DPR sepatutnya melakukan pengawasan sa-ra seluruh anggota DPR, tidak boleh mengambil keputusan seorang diri.

"Kalau nanti praperadilan memutuskan tidak bersalah ya harus dihormati, begitu, engg-ak usah dilawan. Jadi ini ada intervensi atas proses hukum yang dilakukan oleh KPK," lanjut Muzani.

Muzani menegaskan, dirinya segera akan memanggil Fadli Zon untuk mempertanyakan tindakannya tersebut. "Saya mau menanyakan ke Pak Fadli, 'Kenapa lo menulis surat begi-tuan?' tukasnya.

Menurut Muzani, Fadli ber-tindak berlebihan karena menandatangani surat perminta-an penundaan pemeriksaan Novanto. Muzani mengimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Bahwa surat itu di-tandatangani Fadli Zon sama saja. Mau Fadli Zon, mau siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pin-pinan DPR," tutur anggota Komisi I DPR itu.

Selain itu, masih menurut Muzani, surat itu seharusnya dibawa ke Bamus untuk diba-has sebelum dikirim Gerindra, tak setuju dengan surat itu. "Seharusnya itu dibicarakan para anggota Bamus karena ini pernah dibicarakan. Ketika itu, Fraksi Gerindra menyatakan ketidaksetujuannya," kata Mu-zani. (aen)